

*Summary;***MENULIS ULANG SEJARAH USMAN BIN AFFAN**

(Studi Historis Analitis Terhadap Misspersepsi Penulisan Sejarah Usman bin Affan dalam Sejarah Islam )

**A. Latar Belakang**

Pada umumnya, penulisan sejarah Usman bin Affan, sahabat dan suami dari dua putri Nabi Muhammad SAW dilukiskan sangat negatif. Ia dituduh sebagai pemimpin yang korup, suka menghamburkan harta untuk kesenangan pribadi dan kerabat, nepotis, dan menggunakan kekuasaan di luar haknya. Kebaikannya dalam menjalankan tugas sebagai Khalifah, sebanding dengan kekurangannya. Kelemahan dan kebijakannya selama ia menjadi khalifah pada separoh kedua masa kekhalifahannya, memicu adanya pemberontakan dan unjuk rasa yang menyebabkannya terbunuh, dan pada gilirannya peristiwa semua itu menyebabkan lemahnya negara Madinah. Demikianlah gambaran Usman bin Affan dalam sejarah Islam. Pencitraan negatif ini seolah-olah menjadi fakta sejarah yang benar dan tidak terbantahkan, akibatnya adalah bahwa pembaca sejarah Islam, baik itu dari kalangan mahasiswa atau lainnya akan mempunyai persepsi yang sama.

Gambaran negatif tentang diri Usman dalam banyak tulisan sejarah Islam, pada gilirannya menimbulkan banyak pertanyaan; Apakah betul Usman bin Affan adalah seorang koruptor dan suka menghamburkan harta untuk kesenangan pribadi dan keluarga, bukankan dia adalah orang yang kaya raya sejak sebelum masuk Islam dan bahkan sangat suka menyumbangkan hartanya untuk Islam?. Apakah betul dia seorang nepotis, bukankan ada Khalifah lain yang melakukan hal serupa, tapi mengapa ia tidak di-cap sebagai nepotis?. Apakah ia adalah orang yang tidak amanah, sehingga kekuasaan yang ia pegang ia gunakan di luar haknya?., dan Apakah betul dia adalah orang yang sangat lemah dan penyebab kehancuran negara Madinah?., Pertanyaan lantas berkembang semakin dalam, apakah orang yang dijamin masuk sorga oleh Nabi itu adalah orang yang demikian buruk?, dan pertanyaan selanjutnya semakin sulit dijawab, mengapa Nabi Muhammad SAW mengambil menantu dia, bahkan memberikan dua anak perempuannya untuk dinikahinya, kalau dia begitu adanya, bukankan masih banyak sahabat Nabi yang

lebih baik darinya?”, dan masih banyak lagi pertanyaan lain yang tidak kalah menggelitiknya.

Pertanyaan kritis terhadap sejarah Islam klasik sangatlah penting, sebab sangat mungkin para pengkisah dan penulis sejarah Islam awal terkooptasi penguasa sehingga penulis sejarah berusaha menulis sejarah sejalan dengan kemauan penguasa, atau karena metodologinya yang memang tidak pas, sehingga tulisan sejarah Islam tersaji sebagai mana yang didapat dari sumber sejarah. Hal ini tidak mustahil, sebab penulisan sejarah kebanyakan ditulis pada masa Bani Abbasiyah, golongan yang mempunyai sejarah persaingan dan permusuhan dengan Bani Umayyah sejak lama, bahkan sejak masa *jahiliyah*, di mana Usman bin Affan berada pada pihak Bani Umayyah, golongan yang bertentangan dengan Bani Abbasiyah tersebut.

Dalam banyak kasus, perseteruan politik mempunyai akibat ke banyak segi. Yang menang adalah mereka yang “benar”, dan tentu yang berkesempatan untuk membuat “cerita”-nya sendiri. Klaim kebenaran mereka buat dalam banyak hal hingga ke lembaga-lembaga pendidikan lewat buku-buku sejarah yang dipelajari. Berkenaan dengan hal di atas, dalam kausalita sejarah, menurut Kuntowijoyo, mengutip pendapat Gardiner, selalu ada *ceteris paribus*. Yang dimaksud dengan *ceteris paribus* adalah bahwa dalam hal keadaan yang lain sama, akan sama pula kejadiannya; dalam keadaan yang lain berubah, akan berubah pula kejadiannya. Kemenangan Orde Baru atas Orde Lama mempunyai ceritanya sendiri, dan klaim-klaim kebenaran yang sekaligus diikuti oleh stigma negatif bagi lawan (Orla) merebak di semua sektor hingga buku-buku sejarah di sekolah-sekolah. Itulah sebabnya mengapa terdapat keinginan dan desakan untuk menulis ulang kembali sejarah Indonesia, khususnya disekitar pergantian kekuasaan dari Orla ke Orba. Berpijak dengan istilah *ceteris paribus* di atas, kemenangan Bani Abbasiyah atas Bani Umayyah, diduga mempunyai akibat yang tidak jauh berbeda dengan perilaku Orba atas Orla. Untuk itu, upaya penulisan ulang sejarah Usman bin Affan, tidaklah berlebihan adanya.

Usaha untuk menelaah kembali dan menulis ulang sejarah Islam sangat penting dan logis, karena sejarah Islam bagi umat muslim tidak hanya sejarah *an sich*, tetapi juga merupakan bagian dari keberagamaan mereka. Abu Bakar bukan hanya pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama, demikian pula Umar bin

Khattab, juga Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah pemimpin dengan gelar yang tidak dipunyai banyak orang, yaitu “*al-Khulafa al-Rasyidun*”, dan juga “*al-Sabiqun al-Awwalun*”, juga bagian dari sepuluh orang yang oleh Nabi dijamin masuk surga. Karenanya, apabila pemimpin agama, yang bergelar “*al-rasyid*” (yang diberi petunjuk oleh Allah), orang yang pertama-tama masuk Islam, dan yang dijamin oleh Nabi akan masuk surga, adalah seorang dengan pribadi yang tidak baik, koruptor, nepotis, suka mengeruk harta negara untuk kesenangan pribadi dan kerabat, maka mau tidak mau, agama Islam akan turut tercemar, dan kepercayaan mereka kepada para sahabat yang dinyatakan sebagai orang yang baik dan jujur menjadi luntur.

Mengkaji sejarah Islam bagi umat Islam Indonesia, mempunyai kepentingan lebih dari pada khusus. Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas rakyatnya beragama Islam, mengkaji Sejarah Islam adalah mengkaji sejarah dirinya sendiri. Artinya, bahwa sejarah Islam bagi umat Islam di Indonesia adalah bagian dari upaya memahami bagian yang sangat penting dalam dirinya, yaitu keberagamaannya. Oleh karena itulah, tidak salah kalau Wilfred Cantwell Smith mengatakan bahwa sejarah bagi umat Islam adalah sesuatu yang unik. Bahkan dalam beberapa hal, sejarah bagi umat Islam, mempunyai makna yang jauh lebih besar dari pada sejarah bagi semua umat manusia lainnya.

Di sinilah salah satu letak urgensi permasalahan ini. Namun untuk menelaah kembali secara utuh tentang sejarah Islam klasik, khususnya sejarah Usman bin Affan, tidaklah sederhana. Terdapat tiga aspek yang perlu ditelaah ulang, yaitu; historis, historiografis, dan metodologis. Aspek pertama adalah tinjauan yang mengarah kepada proses, kronologis, kesinambungan, perubahan, ruang lingkup masa, dan tempat, serta konteks di mana sejarah itu ditulis. Aspek kedua berkenaan dengan penulisan sejarah. Masalah penulisan sejarah ini tentu tidak bisa lepas dari penulis sejarah itu, sumber-sumber sejarah yang menjadi dasar penulisan sejarah tersebut. Sedang yang ketiga adalah berkenaan dengan perspektif yang digunakan dalam menulis sejarah. Hal ini adalah salah satu yang terpenting dalam upaya penulisan ulang sejarah Islam, sebab kesalahan dalam hal metodologi ini, akan menyebabkan sejarah Islam menjadi seperti sekarang ini, yang penuh dengan distorsi. Masalah ini pula yang menyebabkan sejarawan legendaris



masyarakatnya yang sulit diatur itu adalah salah satu alasan tidak tertariknya kerajaan lain menguasai wilayah itu, selain dari pada peradaban yang masih belum tinggi. Dengan kondisi yang demikian, tidak ada sesuatu yang menjadi tempat perlindungan mereka apabila mendapati kesulitan. Satu-satunya yang bisa menolongnya dari kesulitan adalah sukunya. Namun demikian, tidak ada satupun orang yang bisa memaksa masyarakat Arabia untuk atau tidak berbuat sesuatu.

Permasalahan ini menjadi serius ketika gelombang perpindahan penduduk dari Arabia ke wilayah-wilayah subur Irak berlangsung semakin marak, utamanya pada masa khilafah Usman bin Affan. Mereka yang bermigrasi kebanyakan adalah orang-orang Islam dari Arabia utara, yang sangat terkenal sebagai bangsa nomad, dengan rasa independensinya yang sangat kuat sekuat rasa kesukuan (*ashabiyah*) mereka. Mereka datang dan bergabung ke *amshar-amshar* (tempat-tempat pemukiman pasukan) di Kufah, Bashrah, dan Fusthath. Di tempat barunya ini, mereka tetap dengan sifat independensi mereka dan rasa *ashabiyah*-nya, tanpa merasa perlu untuk tunduk kepada aturan-aturan yang ada di *amshar-amshar* yang dibuat oleh pemerintah pusat di Madinah. Bahkan mereka menganggap bahwa aturan-aturan itu adalah aturan-aturan yang tidak sah.

Perpindahan penduduk ini membawa konsekuensi-konsekuensi lain, yaitu munculnya kembali konflik lama antara Arab utara (Mudlar) dengan Arab Selatan (Himyar). Orang-orang Arab selatan adalah orang yang sudah berbudaya tinggi, mereka sudah hidup menetap dan pernah mempunyai kerajaan yang sangat besar dan tenteram serta hidup dalam kemakmuran. Kemakmuran itu ditunjang oleh adanya bendungan besar yang bernama Ma'rib untuk mengatur pengairan di negerinya. Namun ketika bendungan Ma'rib runtuh, kehidupan mereka menjadi sulit, dan mereka menjadi tercerai berai, sebagian dari mereka bermigrasi ke Syiria. Di tempat yang baru ini mereka tetap berprofesi sebagai petani, keahlian turun-temurun di Yaman sebelum runtuhnya bendungan Ma'rib. Saat Syiria dibebaskan oleh Islam dari kekuasaan Romawi Timur, para pemilik tanah ini tetap di daerah mereka dan memiliki tanah-tanah mereka. Sehingga tidak semua tanah bisa dibagi ke para pejuang Islam. Mereka yang memeluk Islam dikenakan pajak (*kharaj*) atas tanah-tanah pertanian mereka, tetapi yang tidak memeluk Islam dan tetap dalam agamanya terdahulu, maka baginya adalah kewajiban mengeluarkan pajak tanah (*kharaj*) dan pajak kepala (*jizyah*). Berdasar pertimbangan bahwa sangat sedikit

tanah yang dapat dibagi kepada pejuang muslim, dan atas dasar strategi untuk dapat menangkis serangan Romawi Timur (Byzantium) yang belum dapat ditaklukkan secara total, maka Usman mengambil kebijakan untuk tetap meneruskan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab, yaitu menjadikan wilayah Syria sebagai wilayah yang tertutup bagi pendatang baru.

Sementara itu suku-suku Arab utara yang masih berbudaya nomaden, yang berimigrasi ke wilayah Irak tersebut belum mempunyai keahlian dalam bertani, sebab dahulu mereka hidup sebagai peternak dengan hidup yang berpindah-pindah. Di Irak mereka tinggal di *amshar-amshar* sebagai *muqatil* (tentara). Di wilayah Irak banyak terdapat tanah-tanah yang ditinggal oleh pemiliknya ketika wilayah itu dibebaskan oleh pasukan-pasukan Islam dari kekuasaan Kaisar Persia. Tanah-tanah itu lantas dikuasai oleh para pasukan Islam sebagai tanah *anwatan*. Berbeda dengan di wilayah Persia, sungguhpun yang tidak mau berada dalam kekuasaan Islam menyusul ambuknya kekaisaran Persia tidak terlalu banyak, namun mereka-mereka itu adalah tuan-tuan tanah yang kepemilikan tanahnya sangat luas. Untuk menghindarkan timbulnya tuan-tuan tanah (*land lord*) baru yang akan mengakibatkan terjadinya feodalisme di kalangan masyarakat Islam, yang bisa jadi akan menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan pembinaan dan yang akan menggoyahkan Negara, serta menimbulkan kepincangan dan ketidak-merataan sosial, maka Umar bin Khatthab menjadikan daerah ini sebagai daerah terbuka bagi pendatang baru. Lebih dari pada itu, Umar bin Khatthab menjadikan semua tanah rampasan dan barang yang tidak bergerak menjadi milik Negara. Kebijakan ini kelak oleh Usman bin Affan, saat menjadi khalifah, tetap dilanjutkan. Usman memang membagi-bagi tanah untuk dikelola oleh orang-orang tertentu, akan tetapi ia tetap menghindarkan tanah untuk dikuasai oleh segelintir orang. Untuk itu ia membentuk lembaga pertukaran tanah, yang saat itu menjadi sangat urgen karena banyaknya sahabat dan orang Islam yang pindah akibat meluasnya wilayah Islam jauh melewati batas-batas Arabia. Sebagai contoh, Thalhah yang mempunyai tanah di Madinah dan ingin mempunyai tanah di Irak, maka ia harus rela melepaskan tanahnya yang di Madinah untuk keperluan umum dan kemudian ditukar tanah di Irak. Demikian pula orang yang bernama al-Asy'ats, ia harus rela melepaskan tanahnya yang ada di Yaman untuk ditukar dengan tanah di Irak.

Kebijakan yang berbeda yang diambil oleh Umar bin Khatthab yang lantas diteruskan oleh Usman bin Affan untuk wilayah Syiria dan Irak telah membuat keresahan-keresahan, khususnya di wilayah Irak. Para *ahlu al-Qurra'*, dimaksud di sini adalah penduduk yang menetap di wilayah Irak, yang mana Banu Tamim menjadi suku yang dominan, merasa diperlakukan tidak adil, karena Khalifah membuat di dua tempat dengan kebijakan yang berbeda. Permasalahan ini menjadi semakin menjadi-jadi manakala Usman membagi-bagikan tanah kepada orang-orang tertentu untuk mengelola tanah tersebut. Kelak, banu Tamim inilah yang menjadi inti dari gerakan Khawarij.

Dalam pada itu, keadaan di Mesir juga patut diperhatikan. Gubernur Mesir Abdullah bin Sarh, dalam rangka membebaskan wilayah Afrika Utara, memerlukan bala tentara yang masih segar dan kuat, dan itu ada pada tentara yang masih muda-muda. Dalam rangka rekrutmen tentara yang muda-muda itu, ia menjajikan padanya untuk diberi pembagian *ghanimah* yang lebih besar. Para veteran perang yang sudah berumur (senior) merasa bahwa tindakan gubernur tidaklah bijaksana, karena bagaimanapun para veteran adalah mereka yang sudah punya andil dan jasa yang sangat banyak dalam perjuangan sehingga wilayah Islam mencapai demikian luas itu. Pada dasarnya, para veteran tersebut tidak menuntut banyak dan muluk-muluk, hanya ingin bahwa *ghanimah* itu dibagi rata saja. Ketika hal ini belum tuntas, keresahan lain muncul dan bahkan lebih luas karena Abdullah bin Sarh menetapkan aturan-aturan yang lebih ketat untuk masalah keuangan dan perpajakan. Hal ini dikarenakan Negara memerlukan keuangan yang banyak untuk penyediaan perlengkapan perang yang kuat khususnya dalam penyediaan angkatan laut dalam rangka menghadapi angkatan laut Romawi Timur yang berpangkalan di pulau Cyprus dan Rhodes. Untuk itu, ia menaikkan pajak dan mengurangi pengeluaran yang bersifat tunjangan. Ammar bin Yasir, bekas gubernur Kufah masa kekhilafahan Umar bin Khatthab, yang diutus oleh Usman bin Affan untuk menyelesaikan permasalahan itu kiranya tidak bisa berjalan sesuai harapan, karena bagaimanapun ia adalah bagian dari generasi tua (senior) yang lebih condong kepada para vetereran. Di Madinah sendiri, permasalahan tidak kurang peliknya. Tokoh-tokoh muda yang masih energik banyak yang berada di daerah sementara tokoh-tokoh tua, di samping sebagian ada yang di daerah, juga banyak yang sibuk dengan urusan masing-masing. Padahal semakin lama wilayah semakin luas, itu





tertentu yang mungkin akan mempengaruhi konstruksi sejarah yang ia tulis, sungguhpun mungkin saja hal itu tidak disengaja. Dan apalagi kalau ia dari group tertentu, maka akan sangat mungkin tulisan yang ia buat akan cenderung kepada kelompoknya tersebut. Mestinya seorang sejarawan dalam menulis sejarah harus dapat mengesampingkan perasaan se-group, dan perasaan se-ideologi (*group bias* dan *ideology bias*) dan perasaan-perasaan lainnya. Perasaan-perasaan semacam ini sangat merusak hasil tulisannya, karena tulisan sejarah yang dicampuri perasaan semacam itu akan membuat sejarah ditulis bukan yang seharusnya. Selain itu, perasaan suka dan tidak suka (*like and dislike*) juga harus dikesampingkan. Perasaan suka dan tidak suka akan selalu merasuk ke dalam konstruk seorang sejarawan kalau ia tidak mampu menyampingkannya. Fakta-fakta yang seharusnya menjadi sumber sejarah akan diabaikannya atau kalau tidak, akan dibelokkan ke yang ia kehendaki. Akhirnya munculkan sejarah yang dimanipulasikan, atau manipulasi sejarah.

Tentu tidaklah mudah atau bahkan tidak ada sejarawan yang mampu menuliskan sejarah “sebagaimana yang telah terjadi sebenarnya” (“*wie es eigentlich gewesen*” atau “*as it actually was*”), seperti permintaan Leopold von Ranke, sebagaimana yang dikutip oleh Kuntowijoyo. Menjadi “sejarawan yang baik” sudahlah cukup menjamin bahwa ia tidak mengabaikan fakta-fakta yang ada dan akan menulis sebagaimana yang ia ketahui sesuai dengan sumber sejarah yang ia punya. Boleh jadi terdapat fakta-fakta lain yang belum diketahui, yang itu penting sekali, namun karena keterbatasan atau karena hal-hal lain, fakta-fakta itu tidak dipunyainya saat konstruksi sejarah dilakukan.

Fakta-fakta sejarah adalah sesuatu yang sangat penting, karena dari fakta-fakta sejarah inilah akan ada apa yang disebut dengan sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah dapat dibagi menjadi dua macam; yaitu sumber sejarah primer dan sumber sejarah sekunder. Selain dari pada itu, sumber sejarah juga berkaitan dengan otentitas, validitas dan kritik sumber. Fakta-fakta sejarah bermula dari informan yang menerima fakta-fakta sejarah itu, baik berupa sejarah lisan maupun tulisan, yakni catatan-catatan tertulis, dokumen, arsip, inskripsi, prasasti, kitab suci dan lain sebagainya. Dalam awal-awal penulisan sejarah Islam, sumber lisan disebar luaskan oleh para periwayat (perawi), para pengkisah, dan ahli khabar. Sumber lisan yang tersebar ini masih tercampur-baur

antara sumber primier ataupun sumber sekunder. Antara yang valid atau yang tidak valid (tidak dapat diterima), baik itu karena berdasar mitos-mitos maupun cerita fiktif. Semua yang dari para perawi ini lantas dinukil oleh para penulis sejarah Islam (di masa awal-awal) dengan apa adanya.

Berkenaan dengan metodolgi yang demikian, tak kurang dari sejarawan termashur dan terbesar di masa-masa awal, Ibn Jarir al-Thabari mengatakan, bahwa ia hanyalah orang yang menukil dari para perawi, soal isi bukanlah buaatannya dan karenanya, apabila ada yang keberatan dengan isi tulisan tersebut, maka itu semua di luar tanggung jawabnya. Namun Al-Thabari sangat yakin bahwa tulisan-tulisannya cepat ataupun lambat, akan menimbulkan permasalahan; ketidak-senangan kelompok tertentu, ketersinggungan, atau kebencian, yang pada akhirnya akan memunculkan bantahan, sanggahan, ataupun tulisan lain yang menyangkalnya. Itu berarti bahwa tulisannya tidak menurut kenyataan yang sebenarnya. Terhadap yang demikian, al-Thabari sudah membentengi dirinya dengan pernyataannya bahwa jika berita itu salah, maka kesalahannya bukan terletak padanya tetapi pada si pemberi berita (perawi).

c. Penyebab Misspersepsi

Sejarah tidak akan pernah ada tanpa keterlibatan sejarawan sebagai orang yang mencatat suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu. Ini berarti suatu rentetan peristiwa yang telah terjadi pada masa tertentu tidak akan pernah disebut sebagai sejarah kalau tidak ada tulisan yang mencatat peristiwa tersebut. Rentetan-rentetan peristiwa yang pernah terjadi memerlukan jasa sejarawan dalam menkonstruknya sehingga menjadi sebuah sejarah yang bisa difahami dan dimengerti. Dalam proses konstruksi inilah, mau tidak mau, akan terjadi interpretasi, yang seringkali, untuk tidak mengatakan pasti, akan tercampur dan terpengaruh dengan faktor-faktor internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah ilmu pengetahuan, ideologi, bias group atau kelompok, dan lain sebagainya yang ada dalam diri sejarawan yang mengkonstruk sejarah tadi. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah keadaan yang berada di luar diri penulis yang melingkupi dirinya saat konstruk sejarah itu dilakukan. Hal itu bisa berarti kekuasaan yang memaksa dirinya untuk berinterpretasi sesuai dengan kemauan penguasa, atau hal-hal lain yang memaksa sejarawan tidak berbuat lain saat konstruk dilakukan. Tidak menutup kemungkinan bahwa

sejarawan tadi mencari muka di hadapan penguasa karena takut atau mengharap sesuatu dari penguasa tersebut.

Sejarah Islam mulai ditulis pada masa dinasti Abbasiyah. Karya tulis sebelumnya, yakni masa dinasti Umayyah, dengan berbagai macam alasan dan sebab, sulit ditemukan. Karena itu, sejarah yang ditulis masa dinasti Abbasiyah itulah yang menjadi rujukan utama pada sejarawan berikutnya. Dalam hal ini sejarawan Barat-pun mengakuinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Hamilton A.R. Gibb, sebagaimana yang dikutip oleh N. Ashiddiqi, yang mengatakan, bahwa monografik ditulis pertamakali oleh orang-orang Irak. Sementara itu, sarjana-sarjana di Mesir, Syiria, dan Arabia tidak tercatat sebagai penulis. Paling tidak dalam dua abad pertama hijriah. Hal ini mengakibatkan tradisi-tradisi Irak mendapat tempat yang dominan dalam karya-karya penulisan sejarah waktu-waktu kemudian.

Sejalan dengan pendapat di atas, Philip K. Hitti mengatakan bahwa; *“The majority of the earliest historical date from the ‘Abbasid period. Few of those composed under the Umayyads have been preserved”*. Dengan demikian, maka sangat mungkin, untuk tidak mengatakan pasti, bahwa pengaruh dinasti Abbasiyah yang sangat benci terhadap dinasti Umayyah tercermin dalam historiografi sejarah Islam. Bagaimana kebencian itu dengan sangat gampang ditemukan dalam sejarah-sejarah yang tertulis masa itu. Pembantaian kepada seluruh anggota kerajaan dinasti Umayyah saat pengambilan kekuasaan oleh bani Abbasiyah, kecuali satu orang yang dapat lolos dari peristiwa memilukan itu, menjadi saksi yang tidak terbantahkan.

Pada masa ini, sejarawan terbesarnya al-Thabari masih menggunakan metodologi tradisional, demikian pula para sejarawan yang hidup se-zaman dengannya. Pun demikian pandangannya terhadap sejarah. Tidak ada yang berfikir bahwa sejarah adalah ilmu yang rasional. Ia hanyalah reportasi peristiwa saja. Karenanya tidak perlu ada penelitian yang mendalam tentangnya, juga analisa ataupun kritik. al-Thabari adalah sejarawan terbesar yang menjadi panutan bagi lainnya pada masa ini. Kitab sejarahnya *“Tarikh ar-Rasul wal Muluk”* yang ditulis dengan metodologi tradisional, tanpa kritik isi dan analisa, menjadi rujukan utama dan informasi pokok tentang peristiwa sejarah. Dalam kondisi yang sedemikian itulah sejarah Usman bin Affan ditulis.

Sebagai contoh, masalah tuduhan nepotisme yang dialamatkan kepada Usman mestinya perlu dicermati. Sebab adanya ketidak-samaan penilaian antara dua orang yang bersikap sama. Maksudnya adalah bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Usman menjadi berbeda nilainya apabila tindakan itu dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Usman bin Affan dianggap nepotis karena ia telah mengangkat beberapa orang dari kerabat besarnya untuk menjadi pejabat Negara, akan tetapi apabila Khalifah Ali bin Thalib mengangkat kerabatnya untuk menjadi pejabat Negara tidak ada yang menganggap sebagai orang yang juga berbuat nepotis, seperti yang dilakukan oleh Ali dalam pengangkatan Abdullah bin Abbas sebagai gubernur Basrah, Ubaidillah bin Abbas menjadi gubernur Yaman, Qutstsam bin Abbas sebagai gubernur Mekkah dan Thaif, mengangkat anak asuhnya Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur Mesir, serta Tsumamah bin Abbas sebagai gubernur Madinah. Mereka semua adalah orang-orang yang mempunyai kekerabatan dekat dengan Ali bin Abi Thalib, dan jumlah kerabat yang menjadi pejabat penting Negara lebih banyak daripada yang diangkat oleh Usman.

Padahal hampir semua pejabat yang diangkat oleh Usman, adalah orang-orang yang kapabelitasnya tidak diragukan, dan sangat baik. Semua sejarawan mengakui hal itu. Oleh karena itu, permasalahannya ada bukan pada sosok yang diangkat, akan tetapi ada pada dari mana ia berasal, bani Umayyah atau bukan. Kalau permasalah itu, maka keanehan masalah itu jelas, sebab hal itu hanya dipermasalahkan kepada Usman dan tidak kepada Ali, yang juga mengangkat sekian anggota keluarga besarnya menjadi pejabat penting Negara. Pada masa Usman bin Affan, Negara Madinah mempunyai delapan belas gubernur, dan Usman hanya mengangkat lima gubernur dari keluarga besarnya, kemudian mencopot dua gubernur diantaranya, yaitu al-Walid bin Uqbah, dan Sa'id bin al-Ash. Jadi untuk masa yang agak lama, hanya tiga gubernur yang berasal dari keluarga besarnya yang diangkat oleh Usman bin Affan. Tiga orang itu adalah; *Muawiyah sebagai gubernur Syam, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh* sebagai gubernur Mesir, serta *Abdullah bin Amir bin Kurayyiz* menjadi gubernur di Basrah. Dengan catatan bahwa Muawiyah adalah gubernur yang diangkat oleh Khalifah sebelumnya yang terus menjabat hingga masa Usman, jadi dengan demikian, hanya dua gubernur yang betul-betul diangkat oleh Usman. Kalau itu

kenyataannya, apakah masih pantas untuk mengatakan bahwa Usman adalah nepotis?

Karena kondisi sekarang yang sudah berubah, kita dapat berfikir lebih kritis untuk melihat sejarah sehingga kita tidak mengatakan bahwa Umayyah, juga tentu Usman bin Affan, sebagai orang yang lahir berada dalam klan-nya, harus dicela, ataupun pun menganggap pihak Abbasiyah yang harus dibela. Akan tetapi sejarawan sekarang dapat melihat sejarah dengan pandangan kritis dan menginterpretasikan sumber sejarah dengan cara yang baik, rasional, dan tanpa asumsi-asumsi negative terhadap salah satu pihak. Dengan demikian, sejarah akan berkata sewajarnya.

d. Urgensi Penulisan Ulang Sejarah Usman.

Pada masa belakangan kesadaran orang terhadap penulisan sejarah semakin membaik. Catatan sejarah tidak hanya sebuah catatan kenangan, namun sebagaimana yang dikatakan oleh Karl Jaspers, catatan sejarah tidak sekedar diketahui akan tetapi dari situlah bangsa itu hidup. Dia adalah satu karya dasar yang diletakkan yang bangsa itu mengikatkan diri kepadanya, jika mereka tidak menghendaki menjadi sirna, tetapi menginginkan untuk mendapat tempat di dalam humanitas. Di dalam Islam, sejarah mempunyai kedudukan yang jauh lebih penting dibanding lainnya. Ia bagian dari keberagamaan itu sendiri. Artinya sejarah yang ditulis dengan tidak semestinya akan membuat keberagamaan umat Islam terusik. Itulah mengapa di dalam penulisan sejarah Islam masalah ini perlu dicermati dan dilakukan dengan sebenar-benarnya, tanpa rekayasa.

Namun kenyataan yang adalah tidak demikian adanya. Para sejarawan awal Islam menulis sejarah dengan menggunakan metodologi yang perlu dipertanyakan, yaitu metodologi tradisional yang berdasar dari tradisi lisan tanpa adanya kritik. Lebih dari pada itu, sejarawan Islam awal hanya merasa berkewajiban menyampaikan kabar atau peristiwa tanpa merasa berkewajiban untuk mengkritik dan bertanya kenapa hal itu terjadi. *Metodologi isnad* yang diadopsi dari penulisan hadis juga tidak diikuti sebagaimana adanya. Kalau di dalam kritik sanad hadis dibantu dengan ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* untuk menilai setiap sanad dalam rangkaiannya yang banyak itu, maka tidak demikian dengan kritik sanad dalam penulisan sejarah. Penilaian tidak mendalam dan berjenjang, termasuk keterkaitan sanad dengan sanad di atasnya. Hal ini diperparah dengan

bias kelompok dan golongan yang tidak bisa dihindari oleh sejarawan Islam awal tersebut. Atas dasar itu, penulisan sejarah Islam awal menghasilkan sejarah yang cenderung diskriminatif, utamanya terhadap kelompok yang kalah. Dan karena sejarah Islam awal ditulis pada masa Abbasiyah, maka kelompok yang kalah (bani Umayyah) menjadi kelompok yang terdiskriminasi tersebut. Itulah sebabnya mengapa tiada terdapat porsi yang layak dalam penulisan sejarah Islam bagi kekhalifahan yang berkuasa hampir satu abad tersebut.

Kini setelah semua menjadi nyata, maka penulisan ulang sejarah Islam perlu dilakukan, tentu dengan menggunakan metodologi sejarah yang berlaku pada era modern ini. Penulisan ulang sejarah Islam mesti memanfaatkan metode kontemporer dan semua ilmu-ilmu yang membantu dalam penyajian sejarah yang lebih valid. Pendekatan yang digunakan hendaknya melalui beberapa jalur metodologis, seperti metode historis yaitu metode yang mempunyai empat tahapan dalam kerjanya; heuristik (pencarian dan pengumpulan data), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, tidak boleh ketinggalan. Adapun jalur metodologis atau perspektif teoritis lain juga sangat penting untuk digunakan yaitu, di antaranya adalah perspektif ekonomis, sosiologis, antropologi, politikologis, dan kultural-antropologis. Bantuan dari beberapa perspektif di atas sangatlah diperlukan, karena ia mempunyai daya penjabar yang lebih besar dari pada dekripsi sejarah yang polos. Maka dari itu, darinya diharapkan akan terbuka banyak hal, utamanya permasalahan-permasalahan sosial politis yang banyak melingkupi umat Islam secara umum, khususnya masalah yang berkenaan dengan adanya bergantinya kekuasaan dalam historiografi Islam dari Bani Umayyah kepada Bani Abbasiyah dengan segala implikasinya dari adanya perebutan kekuasaan itu.

#### D. Penutup

Memahami sejarah adalah bagian dari memahami identitas diri. Dan bagi Islam, memahami sejarah mempunyai arti lebih daripada itu, karena sejarah bagi Islam dapat berarti keberagamaan itu sendiri. Al-Khulafa' al-Rasyidun, menurut pemahaman kaum muslimin tidak saja sebagai pemimpin Islam pengganti Nabi, juga sebagai pemimpin agama yang dengan itu tentu kualitas pribadi dan kapabelitasnya dalam masalah agama tidak boleh diragukan. Dengan itu, maka

